

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan termasuk Negara, penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Upaya ini ditujukan agar pendidikan yang diselenggarakan mampu mewujudkan *out put* pendidikan yang memiliki daya saing di tengah persaingan global. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut Pemerintah melalui UU No 19 Tahun 2005 menetapkan adanya delapan standar pendidikan, meliputi “standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar penilaian pendidikan.” Dalam upaya memenuhi standarisasi tersebut, permasalahan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu tantangan serius bagi penyelenggara pendidikan. Hal ini karena dalam praktiknya, upaya peningkatan kualitas pendidikan, terkait delapan standar tersebut, membutuhkan dana yang cukup besar sebagai konsekuensi dari meningkatnya biaya operasional lembaga yang semakin kompleks ditambah lagi dengan berkurangnya kemampuan para penyandang dana pendidikan.

Data statistic yang dikeluarkan Kemendikbud 2017/2018, menunjukkan dari 1.072.130 ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta, 44.091 diantaranya rusak total, 63.128 rusak berat, 81.601 rusak sedang,

600.207 rusak ringan dan hanya 283.109 atau hanya sekitar 26,41 % saja yang dalam kondisi baik, hanya 11, 99 % 148.244 sekolah yang memiliki lab IPA, hanya 63,78 % yang memiliki perpustakaan, dan 30,28 % yang memiliki Usaha Kesehatan Sekolah.<sup>1</sup>

Data yang dirilis Oke Zone dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), per 2018 tercatat jumlah ruangan belajar SD yang rusak berat 180.340 unit. Rusak sedang 179.696 unit dan 1.182.054 unit rusak ringan. Pada tingkatan SMP, jumlah ruang kelas yang rusak di seluruh sekolah di Indonesia sebanyak 51.920, dan yang mengalami rusak sedang sebanyak 59.158 ruang kelas. Tingkatan SMA, total ruang kelas yang mengalami rusak berat sebanyak 12.844. Sementara, yang mengalami rusak sedang sebanyak 15.712 ruang kelas, dan yang mengalami rusak ringan sebanyak 151.344. Terakhir, untuk tingkatan SMK, yang mengalami rusak berat sebanyak 6.212 ruang kelas, adapun untuk yang mengalami rusak sedang sebanyak 8.730, dan rusak ringan sebanyak 158.932 ruang kelas.<sup>2</sup> Terkait permasalahan tersebut, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Eka Erlangga mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) untuk mengupayakan alokasi dana-dana dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya, ada beberapa dana dari pemerintah pusat yang bisa dialokasikan untuk merehabilitasi sekolah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik SD 2017/2018, 144-150.

<sup>2</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2019/12/06/337/2138942/251-316-ruangan-kelas-sd-hingga-sma-di-indonesia-rusak-parah>, diakses pada 10 Oktober, 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemda harus berupaya keras untuk bisa meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Dari Kemendikbud ada alokasi dana BOS untuk rehabilitasi dan dana DAK.<sup>3</sup> Sejumlah data diatas mempertegas bahwa permasalahan ketersediaan pendanaan pendidikan merupakan permasalahan serius baik bagi pengelola pendidikan maupun pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan Nasional.

Selanjutnya, meskipun reformasi pendidikan adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak sebagai penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan.<sup>4</sup> Kebutuhan dana tersebut terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar.<sup>5</sup> peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan juga membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Fenomena adanya keseluruhan operasional pendidikan menuntut kemampuan pengelola pendidikan dalam pembiayaan membuat para pengelola menjadikan factor keuangan sebagai salah satu kunci pokok dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana disampaikan Mujamil bahwa dinamika pengelolaan pendidikan dewasa ini terkesan menempatkan uang sebagai sarana utama dalam memajukan suatu lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun Islam. Tanpa dukungan keuangan yang cukup, top manager (pimpinan) lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak untuk memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya dan seolah

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 167

<sup>5</sup> E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, ( Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), 193

upaya memajukan Lembaga Pendidikan Islam tanpa adanya dukungan financial akan terhenti.<sup>6</sup>

Senada, Mulyasa menyebutkan bahwa masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar.<sup>7</sup> Alma dan Ratih menyebutkan bahwa upaya mewujudkan kualitas pendidikan dibutuhkan adanya pengelolaan secara universal dan profesional terhadap sumber daya yang ada, salah satunya adalah masalah keuangan.<sup>8</sup>

Konsep pengelolaan (manajemen) dalam konteks Islam diidentikan dengan kata *at-tadbir* (pengaturan) sebagai derivasi dari kata *dabara* (mengatur) sebagai inteprestasi dari Qs As- Sajdah ayat ke lima<sup>9</sup> yang berbunyi;

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya; Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS As-Sajdah; 5).

Manajemen kekayaan bukanlah peristiwa satu kali; itu adalah proses atau metodologi yang melibatkan strategi jangka panjang untuk perencanaan

---

<sup>6</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: Erlangga,t.t.p), 163.

<sup>7</sup> E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, ( Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), 193

<sup>8</sup> Bukhari Alma dan Ratih Hurriyati, ed. *Manajemen Corporate Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima*, (Bandung: Alfabeta,2008), 138.

<sup>9</sup> Sefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung, Pustakan Setia, 2012), 1

masa depan keuangan. Manajemen kekayaan adalah proses memenuhi tujuan menggunakan keuangan dan kekayaan yang ada melalui manajemen yang tepat. Prosesnya termasuk penciptaan kekayaan, akumulasi, perlindungan, distribusi dan pemurnian. kekayaan islam manajemen kekayaan berbeda dari manajemen kekayaan konvensional dalam hal larangan riba (riba), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (judi) dan membalikkan barang-barang yang dilarang. Ini membantu orang, terutama Muslim, untuk mengelola kekayaan untuk mendapatkan pengembalian dan perlindungan atas kekayaan yang diperoleh sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, proses pengelolaan kekayaan harus mengikuti Syariah mengatur dan tidak boleh mengarah pada kerugian apa pun terhadap individu atau masyarakat mana pun sebagai utuh.<sup>10</sup>

Manajemen kekayaan dalam konteks Islam berbeda dari manajemen kekayaan konvensional dalam hal larangan dari unsur haram, Mirip dengan manajemen kekayaan konvensional, manajemen kekayaan dalam perspektif Islam berkisar pada generasi kekayaan, akumulasi, pelestarian, dan distribusi.<sup>11</sup> Kekayaan dapat diakumulasikan dengan berbagai cara: misalnya warisan, tabungan, hadiah, dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi. Yang terakhir bentuk akumulasi kekayaan mencakup berbagai investasi yang biasanya memerlukan analisis yang cermat dan risiko yang diperhitungkan. Keunikan

---

<sup>10</sup> Nurul Arifah Mahadi,, Siti Aishah Mazli, Aishath Muneeza, **Islamic Financial Wealth Management: Empowering Women in Islamic Societies**, International Journal of Management and Applied Research, 2019, Vol. 6, No. 3, <https://doi.org/10.18646/2056.63.19-008>

<sup>11</sup> Lahsasna, A. (2017), *Readings in Personal Financial Planning, Shariah Wealth Management and Case Studies*, Kuala Lumpur: Islamic Banking & Finance Institute

pengelolaan kekayaan Islam terletak pada kepatuhan Syariah dan juga pemanfaatan aset wakaf untuk memobilisasi dana. Aset dan properti wakaf seperti masjid dan Islam sekolah melayani aspek redistribusi manajemen kekayaan Islam. Sukarela dan sedekah wajib dalam Islam dimaksudkan untuk mendistribusikan kembali kekayaan dalam masyarakat dengan pembangunan sosial dan tujuan kebaikan publik. Setidaknya terdapat lima kebutuhan dalam Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Namun, bukan berarti non-Muslim itu dilarang untuk berpartisipasi dalam dana Islam. Industri keuangan Islam global terus tumbuh karena dukungan kuat dari investor Muslim dan non-Muslim. Secara khusus, investor non-Muslim tertarik dengan tingkat pengembalian yang kompetitif yang ditawarkan oleh bank syariah;<sup>12</sup> selain stabilitas keuangan dan sifat non-spekulatif keuangan Islam<sup>13</sup>

Menyikapi permasalahan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, pengelola lembaga pendidikan pada dasarnya dapat mengembangkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya non manusia, untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan sebagai pemasukan lembaga dan mendukung pembiayaan. Lembaga pendidikan dalam hal ini dapat mengembangkan system manajemen modern terkait pembangan sumberdaya, salah satunya adalah model *wealth management* sebagai model manajemen yang mengelaborasi *asset*

---

<sup>12</sup> Haron, S. and Nursufiza Wan Azmi, W. (2008), "Determinants of Islamic and conventional deposits in the Malaysian banking system", *Managerial Finance*, Vol. 34 No. 9, pp. 618-643. <https://doi.org/10.1108/03074350810890976>

<sup>13</sup> Lahsasna, A. (2017), *Readings in Personal Financial Planning, Shariah Wealth Management and Case Studies*, Kuala Lumpur: Islamic Banking & Finance Institute

*management*, *financial management*, dan *investment management*, dalam arti lebih lengkap dan komprehensif, serta menciptakan hubungan antara lembaga pemberi jasa dan klien yang jauh lebih intens, yaitu bagaimana melindungi kekayaan dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa pensiun.<sup>14</sup> Hasil penelitian Wulandari dan Machali menunjukkan bahwa *wealth management* merupakan salah satu substansi penting yang menentukan berjalan baik atau tidaknya suatu lembaga pendidikan karena memudahkan lembaga pendidikan dalam mengelola dan memetakan sumber keuangan, sumber asset dan kekayaan, seperti dana donator, bisnis-bisnis lembaga, ataupun Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dana sosial dari perusahaan secara efektif dan efisien.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan *wealth management* lembaga pendidikan dapat menjaga, atau menambah, dan menyiasati kekayaan tersebut untuk masa depan lembaga yang semakin hari semakin bertambah.

Berbeda dengan lembaga pendidikan negeri dan non pesantren pada umumnya, Pesantren lebih memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembiayaan yang dimilikinya. Era kapitalisasi pendidikan yang diwarnai pengadopsian manajemen layanan jasa dalam dunia pendidikan telah mendorong pesantren untuk menjadi lembaga yang mandiri. Menurut Syahid, program

---

<sup>14</sup> Richardus Eko Indrajit, dan Richardus Djokopranoto, *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sesuai untuk Sekolah Dasar dan Menengah*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 31.

<sup>15</sup> Deni Titin Ragil Wulandari, Imam Machali, *Wealth Management sebagai Strategi Pengelolaan Aset di PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta* *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 4, Nomor 2, November 2019, 119-219

kemandirian yang dikembangkan oleh pesantren merupakan bagian dari tuntutan pendidikan, ekonomi dan dakwah pesantren itu sendiri yang berdampak positif dimana kegiatan perekonomian pesantren dapat dirasakan oleh seluruh warga di dalam pesantren maupun warga sekitar pesantren.<sup>16</sup> Sementara menurut Solihin, proses kemandirian yang dilakukan pesantren melalui kegiatan-kegiatan perekonomian berorientasi pada pandangan pengasuh dalam meniadakan ketergantungan pesantren dengan pihak eksternal dalam berbagai aktivitasnya serta pertimbangan sosial politik untuk tetap berada di atas semua golongan dan kekuatan sosial politik di luar pesantren dengan mengembangkan berbagai badan usaha yang dengannya dapat membiayai kegiatan pendidikannya.<sup>17</sup>

Mencermati pola kemandirian pesantren tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pesantren dengan semua sumberdaya yang dimilikinya merupakan lembaga pendidikan yang lebih siap menghadapi problematika pembiayaan operasional terkait peningkatan kualitas pendidikan, khususnya terkait pembiayaan pendidikan. Sebagaimana disampaikan Mujamil, sebagai lembaga pendidikan berstatus swasta, beberapa pesantren melalui berbagai usahanya terbukti mampu mengembangkan sumber-sumber keuangan, baik melalui pengelolaan tanah wakaf, maupun aset pesantren lainnya.<sup>18</sup>

Pondok pesantren Hidayatullah Pule dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek merupakan dua pesantren di wilayah Kabupaten

---

<sup>16</sup> Ismail Syahid, "Strategi Mewujudkan Kemandirian Pondok Pesantren Berbasis Pemberdayaan Santri (studi kasus pesantren Hidayatullah Desa Bandar Labuan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang)," *Jurnal Perspektif Sosiologi*, 4 (1) Januari 2016: 56

<sup>17</sup> Mohammad Muchlis Solichin, "Kemandirian Pesantren di Era Reformasi". *Nuansa*, 9 (1) Januari - Juni 2012: 187

<sup>18</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: Erlangga,t.t.p), 169.



Trenggalek yang mengelola asset pesantren sehingga menjadi sumber keuangan bagi pembiayaan pendidikan diberbagai lembaga pendidikan yang dikelolanya, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Pondok pesantren Hidayatullah yang didirikan oleh KH. Ma'shum. Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek berdiri sejak tahun 1977 M dimulai dengan pembangunan masjid dan pesantren tradisi salaf dengan 400 santri baik yang menetap maupun *nduduk* (santri dari kalangan masyarakat setempat). Memanfaatkan gedung madrasah diniyah yang sudah ada dan tahun 1980 didirikan lembaga pendidikan tingkat TK (TK Al- Hidayah). Selanjutnya berturut-turut berdiri SD Islam Al- Hidayah (1984), SMP Al Hidayah (1993), SMK Al- Hidayah (2003), Madrasah Aliyah Hidayatullah (2014) dan MTs Hidayatullah (2015).<sup>19</sup> Disamping keberhasilan pengelolaan aset dalam bentuk pengembangan lembaga pendidikan dari tahun ke tahun sebagaimana tersebut diatas, dengan penerapan system manajemen terpusat, pengelola berhasil memanfaatkan sumber-sumber dana yang dimiliki, seperti tabungan santri, SPP dan biaya hidup santri, sumbangan donator dan dana pendidikan dari pemerintah, sebagai asset pesantren yang dikembangkan dalam berbagai unit lembaga pendukung pendidikan dan unit usaha pesantren.<sup>20</sup> Pengelolaan yang berbasis koperasi pengelola berhasil mengembangkan asset-aset yang dimiliki, seperti sumberdaya manusia (santri, alumni dan guru), lahan, dan dana tabungan siswa, iuran bulanan (SPP), serta jaringan eksternal non pesantren

---

<sup>19</sup> Dokumen Pondok Pesantren Al- Hidayah 2020/2021, Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Hidayah.

<sup>20</sup> Wawancara pendahuluan dengan Yusuf Hamdani, Ketua Yayasan Hidayatullah Pule Trenggalek, 3 Mei 2021.

sebagai modal kemandirian dengan mengembangkan beragam usaha, mulai dari Kopontren, Minimarket, jasa travel angkutan, umrah dan haji, konveksi, digital printing, laundry, catering, dan balai layanan kesehatan.<sup>21</sup> Diantara keberhasilan pengelolaan asset dalam menyasai pembiayaan operasional pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan pesantren menggaji guru di atas standar UMR serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler serta fasilitas pendukung lainnya.

Situs kedua dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek. Perintisan pesantren dimulai tahun 1930 oleh Kiai Murdiyah (atau dikenal juga dengan KH Muhammad Asrori) dan putranya KH Abdul Madjid dengan system pendidikan tradisional berupa ngaji weton, sorogan al Qur'an dan pengembangan tharekat An- Naqsyabandiyah. Tahun 1960 Kiai Qomarudin (Putra Kiai Abdul Majid) mulai membuka pendidikan system madrasah (Madrasah Diniyah) dan Madrasah Ibtidaiyah Formal (1964). Sepeninggal Kiai Qomarudin, kepemimpinan dilanjutkan Kiai Cholil Majid (Putra Kiai Abdul Majid). Dalam rentang tahun 1964 hingga 1986 Pondok Pesantren Qomarul Hidayah berhasil mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raudlatul Athfal (RA) atau setingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun (1966) dan sesuai ketentuan pemerintah selanjutnya PGA menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs). Berturut-turut didirikan pula Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Teknik Menengah (STM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1) dan Sekolah Menengah Ekonomi

---

<sup>21</sup> Observasi pendahuluan pada 3 Mei 2021.

Atas (SMEA) atau SMK 2. Disamping itu untuk menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga tidak mampu, maka didirikan Panti Asuhan Darul Aitam. Guna menampung para lulusan MA Qomarul Hidayah dan sekolah-sekolah yang sederajat khususnya di Trenggalek dan sekitarnya, maka pada tahun 1986 KH Kholil Madjid menggagas dan memprakarsai pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Trenggalek. KH Kholil Madjid bertindak sebagai Ketua Yayasan yang menaungi STIT Sunan Giri.<sup>22</sup>

Keberhasilan kedua pondok pesantren dalam pengembangan lembaga pendidikan tersebut diatas mengindikasikan kemampuan pengelola pesantren dalam memperhitungkan dan mengakomodir sejumlah asset yang dimiliki, baik asset harta benda maupun sumberdaya manusia dan mengembangkannya dalam berbagai unit pendidikan dan usaha pesantren dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan sekaligus sumber dana operasional pendidikan pesantren. Keberhasilan kedua pesantren tersebut dalam mengelola dan mengembangkan asset sehingga mampu mengembangkan berbagai jenjang lembaga pendidikan dari tahun ketahun ditengah maraknya keterpurukan lembaga-lembaga pendidikan formal non pesantren, khususnya terkait pendanaan sebagaimana dipaparkan sebelumnya merupakan fenomena menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan alasan yang bersifat umum dan khusus tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pengelolaan asset pesantren “Pengelolaan Aset Berbasis *Wealth Management* Dalam Upaya Meningkatkan

---

<sup>22</sup> Dokumen PPQH 2020/2021, Sejarah Singkat Ponpes Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek

Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek)”).

## **B. Fokus Penelitian**

Focus penelitian ini adalah pengelolaan aset dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan di pondok pesantren dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek?
3. Bagaimana pengawasan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan model perencanaan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek.
2. Menemukan model pelaksanaan pengelolaan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek.
3. Menemukan model pengawasan aset berbasis *wealth management* dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang berjudul “Pengelolaan aset berbasis *Wealth Management* dalam upaya meningkatkan pembiayaan pendidikan di pesantren (Studi di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek)” diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun teori serta memperkaya wawasan konsep yang berkaitan dengan pengelolaan aset pondok pesantren dalam upaya

memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

## 2. Secara Praktis

Temuan ini dapat bermanfaat dan dijadikan sumber masukan khususnya:

### a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek Trenggalek sebagai tambahan wawasan dan bahan pertimbangan baru bagi pengelola untuk menerapkan manajemen aset berbasis *wealth management* dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

### b. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini di harapkan diharapkan dapat digunakan sebagai studi perbandingan bagi yang relevan dengan pembahasan terkait manajemen aset pondok pesantren berbasis *wealth management*.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Definisi konseptual

#### a. Pengelolaan aset

Pengelolaan (manajemen) menurut James A.F Stoner sebagaimana dikutip Sagala, adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dari suatu usaha dari anggota organisasi yang memanfaatkan penggunaan sumber-sumber daya organisatoris

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Sedangkan aset adalah uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan/gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai, yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>24</sup> Atau sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh”.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset adalah proses metodologis yang melibatkan perencanaan jangka panjang dalam mengelola keuangan dan kekayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. *Wealth Management*

*Wealth management* adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melindungi kekayaan dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa pensiun.<sup>26</sup> Mahaalli & Ara menyebut bahwa *wealth management* adalah suatu proses pengembangan, proteksi, dan pengelolaan, kekayaan seseorang atau organisasi melalui produk dan jasa finansial. *Wealth Management* juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam mengelola produktifitas kekayaan di mana sinergi diperoleh dari perencanaan dan

---

<sup>23</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. (Bandung: Alfabeta: 2009), 51.

<sup>24</sup> Ibid, 9

<sup>25</sup> Dwi Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 139

<sup>26</sup> Eko Indrajit dan Djokopranoto, *Wealth Management...*, 31

pengembangan yang tepat.<sup>27</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *wealth management* adalah tentang bagaimana mendapatkan, menjaga dan mengembangkan aset.

c. Pembiayaan pendidikan

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif.<sup>28</sup>

## 2. Definisi Operasional.

Secara operasional yang dimaksud peneliti dengan judul Pengelolaan Aset Berbasis *Wealth Management* dalam Upaya Meningkatkan Pembiayaan Pendidikan di Pondok Pesantren (Studi multisitus di Pondok pesantren Hidayatullah Pule Trenggalek dan Pondok pesantren Qomarul Hidayah Trenggalek) adalah upaya memperoleh, menjaga dan mengembangkan uang, barang, tanah, gedung atau sejenisnya yang ditempuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam upaya meningkatkan kemampuan pesantren dalam memenuhi tanggung jawab pembiayaan Pendidikan.

---

<sup>27</sup> Imam Mahalli dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, (Jakarta: Prenadamia Group, 2016), 414

<sup>28</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 228.